

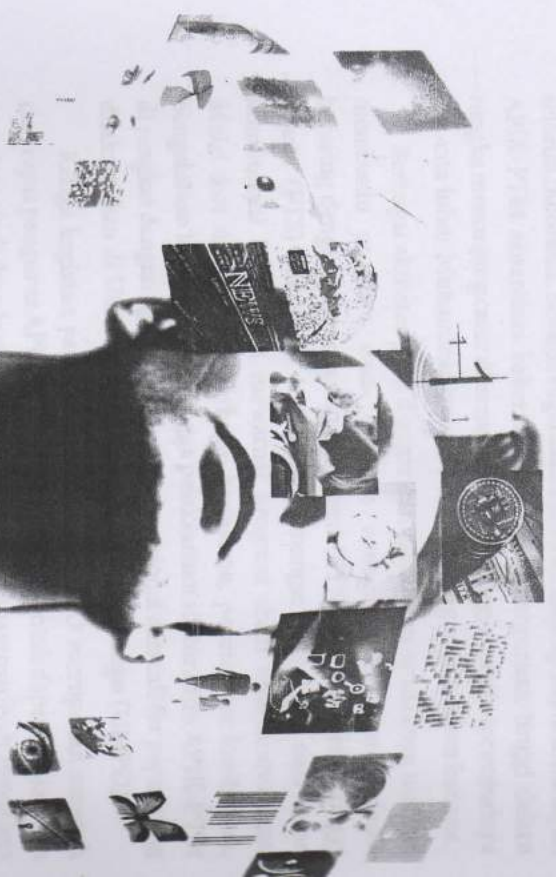
KOMUNIKASI BERKEMAJUAN
 dalam Dinamika Media dan Budaya

Komunitas Komunikasi Berkeadilan
 dan Berkeadilan
 Komunitas Komunikasi Berkeadilan dan Berkeadilan
 Komunitas Komunikasi Berkeadilan dan Berkeadilan

Editor: Nurul Huda
 Editor: Nurul Huda
 Editor: Nurul Huda

Penerbit: Komunitas Komunikasi Berkeadilan dan Berkeadilan
 Penerbit: Komunitas Komunikasi Berkeadilan dan Berkeadilan
 Penerbit: Komunitas Komunikasi Berkeadilan dan Berkeadilan

KOMUNIKASI BERKEMAJUAN
 dalam Dinamika Media dan Budaya



Kata Pengantar

Abriar Adhani, S.Sos., M.I.Kom

Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi
 Perguruan Tinggi Muhammadiyah "APK-PTM"

Drs. H. Sulton, M.Si

(Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto)

Editor:

Filosa Gita Sukmono

Nurudin

Abrar Adhani, S.Sos, M. (Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah "APIK-PTM")

Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Muhammadiyah (APIK-PTM) yang terlahir di akhir tahun yang saat ini baru berusia empat tahun senantiasa berbenah organisatoris. APIK-PTM merupakan wadah bagi program studi komunikasi di bawah naungan perguruan tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia. Sebagai organisasi di bawah lingkup Muhammadiyah APIK-PTM senantiasa bekerjasama dengan perguruan tinggi rangka menunjang catur dharma perguruan tinggi menuju terwujud cita-cita luhur Muhammadiyah dalam membangun peradaban bangsa.

Berbagai aktivitas yang digagas dan dilahirkan setidaknya membantu program studi dibawah naungan PTM untuk bersaing dengan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan swasta (PTS) lainnya di Indonesia. Semangat yang lahir dari komunikasi PTM turut mewarnai program studi ilmu komunikasi dari membangun berbagai kerjasama, perumusan kurikulum pengelolaan laboratorium, hingga pelaksanaan silaturahmi APIK-PTM di rangkai dengan agenda seminar internasional dan call for paper dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO).

Ketiga kegiatan yang dilaksanakan di UMPO merupakan dari rapat pengurus APIK-PTM dengan tujuan untuk dapat menjadwalkan program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai program studi terdepan di kota yang terkenal dengan Ponorogonyanya tersebut. Kegiatan ini diharapkan melahirkan silaturahmi yang kuat antar sesama program studi ilmu komunikasi PTM melahirkan karya ilmiah yang dapat menambah khasanah komunikasi untuk Indonesia.

KOMUNIKASI BERKEMAJUAN
dalam Dinamika Media dan Budaya

© Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APIK-PTM)
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang All Rights Reserved
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit
Cetakan Pertama, Agustus 2017
624 hal (xx+ 604 hlm). ; 15.5 x 23.5 cm
ISBN: 978-602-6751-78-2

Kata Pengantar

Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom
(Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah "APIK-PTM")
Drs. H. Sulton, M.Si
(Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo)

Penulis

- Abrar Adhani, Achmad Nashrudin P, Ade Putranto Prasetyo Wijiharto Tunggal, Adhianty Nurjanah, Agus Naryoso, Akhyar Anshori, Anang Masduki, Arif Tri Sadewa, Arman Maulana, Ayu Adriyani, Ayub Dwi Anggoro, Wan Abd. Aziz Bin Wan Mohd Amin, Bagas Suryo Adi, Budi Dwi Arifianto, Choiril Fajri, Corry Novrica AP Sinaga, Dahlia, Dian Muhtadiah Hamna, Dikhorir Afnan, Eceh Trisna Ayuh, Erwan Sudiwijaya, Fajar Junaedi, Falimu, Fauzia Kurniawati, Gibbran Prathisara, Heri Setiawan, Ida Ri'aeeni, Intan Amanda, Isnani Dzuhriha, Krisna Megantari, M. Himawan Sutanto, Mochammad Imron Rosyidi, Muhammad Mutaqien, Muhammad Said Haraha, Muhammad Tahir, Novin Farid Styo Wibowo, Novita Damayanti, Nurudin, Puji Santoso, Ravik Karsidi, Restu Putra Tegar Perkasa, Rhesa Zuhriya Briyan Pratiwi, Ribut Priadi, Rudianto, Sidiq Setyawan, Sri Ageng Wiradhana, Sri Kusumo Habsari, Sri Widowati Herieningsih, Sugeng Winamo, Taufiq Syarifudin, Taufiqur Rahman, Teddy Dyatmika, Triani Nurmalasari, Uun Machsunah, Widiya Yutanti, Widodo Muktiyo, Winardi Firdaus, Wuri Rahmawati, Yudha Wirawanda, Zein Mufarrh Muktaf.

Editor:

Filosa Gita Sukmono, Nurudin
Diterbitkan oleh:
Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APIK-PTM)

bekerjasama dengan

Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

dan

Buku Litera Yogyakarta
Minggiran MJ II/1378, RT 63/17
Suryodiningrat, Mantrijeron, Yogyakarta
Telp. 0274-388895, 08179407446
Email: bukulitera@gmail.com, bukulitera2@gmail.com

Pengelolaan Komunikasi Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPB) Pemerintah Kabupaten Sleman

Krisna Meganti

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Ponorogo
✉ megantarikrisna@gmail.com

Pendahuluan

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Penyebabnya adalah faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Hal ini bisa diantisipasi dengan adanya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi serangkaian upaya yang terdapat dari kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan paskabencana. Dan yang ditimbulkan oleh bencana sangat merugikan masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu pengelolaan mengenai penanggulangan bencana dengan tepat dalam rangka pengurangan risiko bencana.

Kejadian erupsi gunung Merapi merupakan salah satu bencana alam yang terjadi di bulan November tahun 2010. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api yang masih aktif di dunia terletak di kabupaten Sleman propinsi Yogyakarta. Erupsi gunung Merapi mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah yang tidak sedikit. Begitu pula dengan kerusakan yang ditimbulkan lainnya seperti kerusakan lingkungan maupun dampak psikologis yang ditimbulkan bagi para korban bencana Merapi.

Sleman merupakan wilayah yang paling parah terkena dampak erupsi Merapi maupun lahar dingin Merapi. Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Sleman selaku unit pengelola tertinggi di tingkat daerah berkewajiban dalam pengelolaan penanggulangan bencana Merapi. Peran pemerintah sangat vital dalam hal penanggulangan bencana Merapi. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah yang mengelola mengenai anggaran penanggulangan bencana. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) merupakan badan yang mengurus penanggulangan bencana daerah di Pemkab Sleman. Badan ini bertugas dalam mengelola semua aspek yang terkait dengan penanggulangan bencana. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa salah satu penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana (Pasal 35).

Kegiatan pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. Jadi pengurangan risiko bencana adalah upaya sistematis untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, strategi dan tindakan yang dapat mengurangi kerentanan dan risiko bencana yang dihadapi masyarakat, guna menghindari dan membatasi dampak negatif dari bencana. Kebijakan pengurangan risiko bencana biasanya memiliki dua tujuan, yakni untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan menjaga agar kegiatan pembangunan dapat mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bahaya.

Pengelolaan aspek komunikasi oleh BPBD merupakan salah satu poin primer dalam penanggulangan bencana. Aspek tentang komunikasi bencana merupakan upaya meningkatkan kualitas penanganan bencana. Faktanya, dalam setiap penanganan bencana sangat diperlukan komunikasi. UU No 24 Tahun 2007 menjelaskan tiga tahapan dalam penanganan bencana yaitu pra bencana terdiri dari dua kondisi yaitu dalam situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi aspek kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.

Kompleksitas komunikasi mengenai penanggulangan bencana di tahap pra bencana merupakan tahapan yang harus disinergikan oleh beberapa unit pengelola. Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 diperlukan suatu pengelolaan komunikasi bencana yang tepat dan terpadu dalam tahap pra bencana yang meliputi kesiapsiagaan,

peringatan dini, dan mitigasi bencana sehingga jumlah korban bencana bisa diminimalisir. Fenomena ini menarik untuk dikaji dikarenakan begitu kompleks pihak-pihak yang terkait dalam penanganan bencana serta pengelolaan komunikasi yang dinilai belum maksimal. Terkait dengan kejadian erupsi Merapi pada tahun 2010, maka fokus dari tulisan ini adalah pengelolaan komunikasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Pemkab Sleman pada tahap pra bencana yang meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana paska kejadian erupsi Merapi 2010.

Pembahasan

Kompleksitas Pengelolaan Komunikasi Bencana

Dalam tahap pra bencana, komunikasi bencana merupakan suatu rangkaian vital yang bertujuan untuk pengurangan risiko bencana. Salah satu aspek penting dalam komunikasi adalah konsep reduksi ketidakpastian. Pesan harus diolah sedemikian rupa sehingga dalam berkomunikasi tidak ada *noise* atau gangguan yang ada dalam lingkaran komunikasi sehingga ketidakpastian dapat dikurangi. Frank Dance menyatakan bahwa komunikasi itu sendiri muncul karena adanya kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, supaya dapat bertindak secara efektif demi melindungi atau memperkuat ego yang bersangkutan dalam berinteraksi secara individual maupun kelompok (Littlejohn, 2006: 7).

Dalam pengorganisasian pesan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam penanganan bencana yang meliputi pemerintah, swasta, maupun masyarakat diperlukan sistem pengelolaan pesan yang integratif dengan pemahaman bersama dari semua pihak yang terkait. Fakta yang terjadi adalah, ada pesan-pesan yang direduksi atau ditambahkan oleh pihak yang berkepentingan. Susanto (2011: 5) mengungkapkan bahwa problem koordinasi sebagaimana dalam uraian tugas lembaga sub-ordinat kekuasaan negara masih dibelenggu oleh lemahnya komunikasi antar unit dalam menjalankan birokrasi yang teramat kaku. Ditambah lagi, pedoman dalam penanganan bencana dari lembaga swasta dapat tidak sejalan dengan regulasi pemerintah yang dinilai teramat kaku. Di pihak lain, kelompok peduli bencana yang dibentuk masyarakat secara temporer, juga memiliki program kerja sendiri yang

tidak dikoordinasikan dengan berbagai pihak yang bertanggung jawab terhadap bencana.

Situasi yang demikian ini mengakibatkan pesan yang disampaikan dari masing-masing elemen menjadi tidak terkoordinir dengan baik sehingga berdampak munculnya informasi penanganan bencana yang bervariasi. Hal itu berdampak pada penerimaan pesan oleh masyarakat sebagai korban bencana. Dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian, masyarakat cenderung menerima informasi tanpa melakukan seleksi terhadap kebenaran sebuah pesan.

Berbagai aliran informasi yang datang dari berbagai media dengan menggunakan teknologi komunikasi, cenderung menjadi suatu kebenaran. Proses kecepatan dalam penerimaan informasi merupakan salah satu keunggulan pesan yang terbungkus dalam teknologi komunikasi. Secara fakta keberadaan SMS (*Short Message Service*) dalam situasi bencana bisa menjadi panduan informasi yang menyelesaikan karena sumber informasi yang kurang akurat. Rogers mengungkapkan bahwa modernisasi teknologi komunikasi menyebabkan pengawasan masyarakat menjadi lebih penting, walaupun sulit dilaksanakan. Dari uraian tersebut, teknologi komunikasi selayaknya dapat dipakai dalam menyebarkan informasi bencana yang aktual kepada masyarakat dan bukan sebaliknya (Susanto, 2011: 51). Hal senada diungkapkan oleh Zamzami, dkk (2011: 47) bahwa media memang tidak bisa mencegah datangnya bencana, tetapi bisa berkontribusi mencegah banyaknya korban dengan mengurangi kepanikan masyarakat akibat isu-isu dan rumor yang tidak bertanggung jawab, juga untuk mendidik masyarakat agar lebih melek bencana.

Pemerintah selaku pemegang kendali informasi di tingkat tertinggi wajib dalam mengatur lalu lintas informasi bencana sehingga tidak merusakkan masyarakat. Dalam hal ini Negara melalui unit-unit yang bertanggung jawab terhadap bencana alam mampu menjadi rujukan informasi dan pesan-pesan bencana yang paling memiliki kredibilitas. Dengan informasi yang memadai maka masyarakat di wilayah bencana akan merasa tenang karena kebutuhan informasinya terpenuhi dengan baik.

Mengelola bencana secara integratif bukan hal yang mudah. Diperlukan kesinambungan komunikasi antar unit-unit yang ada di

berbagai pihak yang bertanggungjawab terhadap peristiwa bencana. Problem koordinasi sering dihambat oleh lemahnya komunikasi antar unit akibat menjalankan birokrasi yang kaku. Dampaknya adalah informasi seputar bencana yang dikeluarkan tidak kontinyu, tetapi muncul pada saat tertentu. Dengan demikian, pengelolaan tidak bisa dilakukan secara sporadis, namun harus menyentuh semua lapisan masyarakat. Sebab secara asasi, kebutuhan atas informasi adalah hak yang melekat dalam diri manusia (Haryanto, 2010: 7). Hal tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang ada di masyarakat seperti media massa dan media alternatif lainnya.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempunyai andil yang cukup besar dalam hal komunikasi bencana. salah satu contohnya adalah perkembangan internet. Dalam prakteknya, aspek komunikasi dalam hal ini adalah penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan melalui media sangat penting untuk ditinjau lebih jauh dalam hal pengelolaan komunikasi bencana. Media dalam berkomunikasi merupakan sarana yang mempunyai beragam pilihan bagi komunikator maupun komunikan yang melakukan proses komunikasi. Dengan adanya keberadaan media yang beragam dalam penyampaian informasi bencana, maka pilihan terhadap penggunaan akses media yang tepat dalam informasi kebencanaan, merupakan salah satu langkah yang tepat. Budi dalam Susanto (2011: 35) menyatakan bahwa sebagai institusi penyedia informasi, media menjadi pusat perhatian publik, khususnya pada berbagai peristiwa bencana yang ada di Indonesia. Secara positif, media dapat menjadi sumber pertama dalam pemberian informasi peristiwa bencana, menunjukkan perkembangan dan secara psikologis mendorong rasa kemanusiaan publik dan menjadi mediator bantuan bencana.

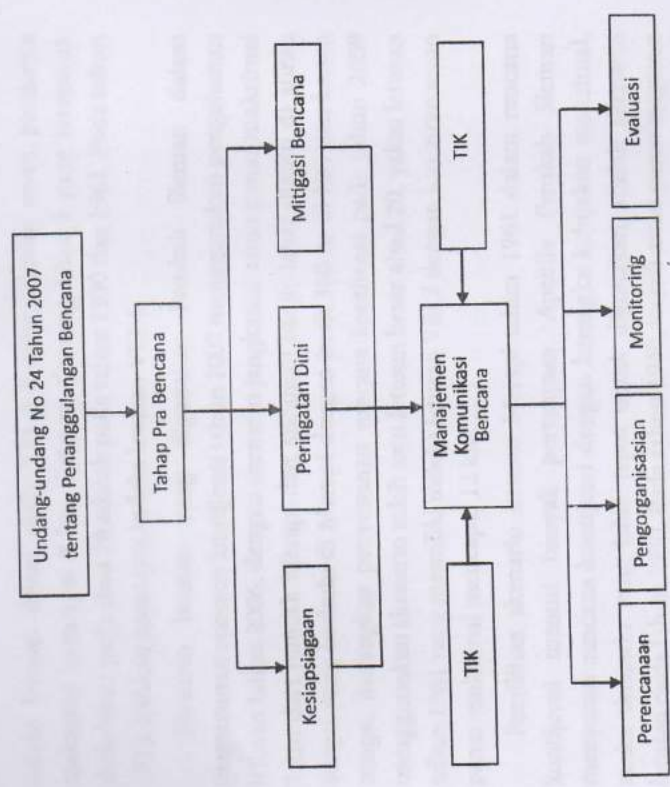
Dalam perkembangannya, media yang mampu mengemas informasi secara cepat dan aktual adalah internet. Melalui internet, informasi seputar bencana akan mudah diterima masyarakat. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Nugroho dan Sarwo (2011: 20) dalam tulisannya yang berjudul *Gencatan Media Online* yang menyatakan bahwa informasi tentang kebencanaan tidak hanya dibatasi oleh media cetak atau media elektronik, kini dengan munculnya teknologi baru yang bernama media online, maka akurasi waktu

dalam penerimaan informasi dapat diterima dengan cepat. Dalam penggunaan media online, internet dimanfaatkan sebagai penyimpan berbagai informasi untuk disebarkan kepada khalayak yang ada di seluruh dunia yang mampu mengakses.

Melalui internet, dapat dilihat perkembangan terkini mengenai gejala-gejala alam maupun informasi terkait dengan bencana alam. Informasi bencana alam sangat dibutuhkan dalam upaya pengelolaan bencana alam terutama pada langkah-langkah mitigasi dan persiapan menghadapi bencana. Mitigasi merupakan proses pencegahan atau pengurangan akan kemungkinan terjadinya bencana, dan pengurangan kerugian akibat terjadinya bencana. Sedangkan langkah persiapan menghadapi bencana ini termasuk misalnya melakukan prediksi dan peringatan dini akan terjadinya bencana (*early warning*). Informasi bencana alam yang tersusun dalam *database*, sangat penting untuk diketahui secara tepat waktu bagi semua pihak, baik pihak pengelola bencana, pemerintah, maupun masyarakat. Agar semua pihak dapat memperoleh semua informasi tentang kebencanaan yang diperlukan, maka diperlukan suatu sarana diseminasi dan sosialisasi informasi. Diseminasi informasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti misalnya publikasi melalui media massa, koordinasi antara instansi terkait, maupun melalui jaringan internet.

Berbagai kompleksitas pengelolaan komunikasi bencana telah dijelaskan di atas. Aspek pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan acap kali terdapat *noise* atau gangguan didalamnya. Diperlukan suatu pengelolaan komunikasi bencana yang tepat dalam tahap pra bencana. Tahap pra bencana merupakan tahapan vital sebagai upaya dalam rangka pengurangan resiko bencana jika terjadi bencana seperti sebelumnya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat digambarkan kerangka konsep tulisan ini sebagai berikut:



Gambar 1.

Kerangka Konsep Pengelolaan Komunikasi Bencana pada Tahap Pra Bencana

Pengelolaan Komunikasi Bencana oleh BPBD Pemkab Sleman pada Tahap Pra Bencana

Pengelolaan komunikasi bencana merupakan suatu tahapan yang diperlukan dalam manajemen komunikasi bencana. Dengan adanya tata kelola informasi pada tahapan bencana secara tepat dapat mengurangi adanya korban melalui pengelolaan sistem informasi yang terpadu. Elemen komunikasi dan proses yang ada dalam komunikasi bencana merupakan kedua elemen yang vital dalam pengelolaan komunikasi bencana. Pedoman dasar dalam penanggulangan bencana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, dijelaskan ada tiga tahapan dalam tahap pra bencana, yakni kesiapsiagaan bencana, sistem peringatan dini, serta mitigasi bencana. Dari semua proses tersebut dirangkai menjadi satu kesatuan yakni manajemen komunikasi bencana yang mempunyai empat tahapan yakni, perencanaan, pengorganisasian, monitoring, dan yang terakhir evaluasi.

Pertama adalah aspek kesiapsiagaan yang dilakukan oleh BPBD Pemkab Sleman. Salah satunya adalah tertuang dalam Rencana Kontijensi Bencana. Rencana kontijensi dibuat terakhir oleh BPBD Pemkab Sleman pada tahun 2009. Paska erupsi Merapi 2010, BPBD kembali menyusun rencana kontijensi di tahun 2012 dan sedang dalam proses penyusunan.

Penyusunan rencana kontijensi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan beberapa *stakeholder* penanggulangan bencana, diantaranya BPPTK Yogyakarta, Pusat Studi Manajemen Bencana (PSMB) UPN Veteran, SKPD Kabupaten Sleman, Kodim 0732 Sleman, SAR, Organisasi Kemasyarakatan, PMI Sleman, Rumah Sakit Panti Nugroho, dan perwakilan dusun di KRB.

Metode penyusunan rencana kontijensi dilakukan melalui beberapa tahap *workshop* dengan peserta dan narasumber yang diantaranya adalah BPPTK Yogyakarta, akademisi UPN Veteran, SKPD Kabupaten. Selanjutnya para peserta penyusunan rencana kontijensi mendata sumber daya (personil, alat transportasi, dan alat telekomunikasi) yang dapat dimobilisasi pada saat tahap tanggap darurat. Data yang telah disampaikan oleh penyusunan rencana kontijensi kemudian diverifikasi dengan dua cara, yakni: 1) membandingkan dengan data resmi dari BPS. Contohnya adalah data penduduk. 2) dilakukan dengan *cross check* data yang disampaikan peserta lain. Salah satu tujuan dari penyusunan rencana kontijensi adalah menegakkan komitmen *stakeholder* penanggulangan bencana untuk dapat memobilisasi sumber daya yang dimiliki pada saat tahap tanggap darurat bencana.

Dalam penyusunan rencana kontijensi, pengembangan skenario letusan Merapi menjadi tahapan penting. BPPTK Yogyakarta sebagai perencana skenario letusan, tidak terpikirkan untuk menyusun skenario letusan Merapi yang besar dan eksplosif dengan indeks letusan VEI 4 (keluaran magma hingga mencapai 100 juta meter kubik yang merupakan letusan terbesar dalam sejarah letusan Merapi. Merapi tercatat pernah erupsi secara eksplosif yang diduga indeks letusan VEI 4, yaitu pada tahun 1020, 1285, 1584, dan 1872.¹ Skenario letusan rancangan BPPTK Yogyakarta didasarkan pada karakteristik khas erupsi Merapi abad-20, yaitu adanya guguran kubah lava dengan

¹ <http://pendakijogja.wordpress.com/2010/12/15/2010-merapi-giant-eruption-vei-4-part-ii/>, diakses 7 Juli 2012, pukul 13:45

indeks letusan dalam skala VEI 1-3 yang sebaran awan panasnya maksimal mencapai 8 km. Letusan Gunung Merapi yang termasuk skala besar pada abad 20 adalah pada tahun 1930 dan 1961. Pada tahun 1930, bahkan mencapai indeks letusan VEI 4.

Skenario letusan yang digunakan Pemkab Sleman dalam penyusunan rencana kontijensi tahun 2007 menggunakan pengalaman letusan tahun 2006, dengan skenario jangkauan awan panas maksimal 7 km dari puncak Merapi dan ancaman banjir lahar dingin di aliran sungai yang berhulu di Merapi dengan jarak 300 m di kiri dan kanan sungai. Sedangkan penyusunan rencana kontijensi pada tahun 2009 menggunakan skenario salah satu letusan besar abad 20, yakni letusan tahun 1961 yang memiliki indeks letusan VEI 3 dengan luncuran awan panas maksimal mencapai 12 km.

Pemilihan skenario letusan Merapi tahun 1961 dalam rencana kontijensi menuai banyak pertanyaan. Apabila Pemkab Sleman menyusun rencana kontijensi dengan kerangka kebijakan maksimal, maka skenario yang lebih tepat untuk digunakan adalah skenario letusan pada tahun 1930. Pada tahun 1930, terjadi awan panas guguran besar, yang disertai letusan dengan mencapai jarak 13,5 km dari puncak Merapi. akan tetapi, menurut BPPTK Yogyakarta, skenario ketusan Merapi tahun 1961 merupakan antisipasi kemungkinan terburuk dari skenario yang ada.

Pada kenyataannya, skenario letusan rencana kontijensi ini meleset dengan besarnya letusan yang terjadi pada erupsi Merapi tahun 2010 yang mencapai indeks letusan VEI 4. Letusan Merapi 2010 yang berbeda dengan skenario rencana kontijensi menyebabkan Pemkab Sleman tidak mempunyai rencana operasi darurat dalam menghadapi letusan Merapi yang di luar kelaziman. Oleh sebab itu, seharusnya skenario letusan Merapi dengan indeks skala letusan VEI 4 harusnya diadopsi karena pernah terjadi dalam sejarah letusan Merapi.

Dalam aplikasinya, rencana kontijensi yang dibuat Pemkab Sleman pada tahun 2009 belum ditandatangani oleh Bupati (formalisasi). Rencana tersebut juga belum disampaikan ke DPRD kabupaten Sleman untuk mendapatkan komitmen politik dan dukungan pengalokasian anggaran. Oleh karena itu, rencana kontijensi 2009 saat itu belum dapat menjadi dokumen resmi dan siap dilaksanakan menjadi rencana

Komunikasi Berkemajuan :
dalam Dimensi Media Dan Budaya

operasi tanggap darurat apabila terjadi bencana. Pelaksanaan yang terjadi di lapangan hanya bergantung pada komitmen dari masing-masing pelaku yang terlibat dalam penyusunan, sehingga rencana kontijensi belum menjadi komitmen seluruh pimpinan SKPD dan organisasi penanggulangan bencana.

Rencana kontijensi dibuat terakhir pada tahun 2009. Kini BPBD Pemkab Sleman sedang melakukan penyusunan rencana kontijensi berikutnya dan telah tercapai sekitar 40%. Diharapkan rencana kontijensi selanjutnya dapat disusun berdasarkan pengalaman sebelumnya dan dapat membaca situasi bencana secara seksama, sehingga dapat meminimalisir jumlah korban bencana. Formalisasi dalam rencana kontijensi 2012 diperlukan, guna mewujudkan penyatuan semua unit kesatuan di Pemkab Sleman dalam penanganan bencana.

Kekacauan dalam aspek komunikasi dapat terlihat dalam rencana kontijensi 2009, yakni mengenai kerancuan dalam hal formalisasi rencana kontijensi, sehingga mengakibatkan kinerja yang kurang maksimal antar unit kesatuan di Pemkab Sleman. Paska erupsi Merapi 2010, rencana kontijensi yang dibuat pada tahun 2012 masih dalam proses, namun aspek formalisasi perlu dipertimbangkan mengingat fungsinya yang vital dalam hal teknis ketika bencana terjadi. Yang patut disayangkan adalah, ketika rencana kontijensi 2012 ini disusun, pihak luar dari kalangan akademisi tidak diperkenankan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai konsep dari rencana kontijensi dikarenakan alasan bahwa rencana kontijensi masih dalam proses dan belum adanya formalisasi.

Kedua adalah sistem peringatan dini atau yang biasa disebut dengan *early warning system*. Pemkab Sleman belum memiliki prosedur tetap (protap) pembunyan sirine hingga saat ini. Protap pembunyan sirine bertujuan dalam hal pengaturan tugas operator sirine, mekanisme informasi peringatan dini, mekanisme pembunyan sirine, serta jadwal pembunyan sirine. Berdasarkan prosedur, maka Bupati selaku Ketua Satlak PB kabupaten Sleman akan mendelegasikan kepada seseorang untuk mengaktifkan sirine awan panas setelah mendapatkan pemberitahuan dari BPPTK Yogyakarta. Tombol otomatis berada di Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi (Santel) Sekretariat Daerah (Sekda) kabupaten Sleman yang akan diaktifkan pada saat status Merapi Awak.

Pada saat erupsi Merapi tanggal 26 Oktober 2010, mekanisme pembunyan sirine tidak berjalan dengan lancar. Pembunyan sirine awan panas tidak melalui Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi (Santel), tetapi langsung diaktifkan oleh operator sirine. Sebelum membunyan sirine, operator menunggu pemberitahuan dari petugas Pemantauan Gunung Merapi (PGM) Kalierang atau mendengar bunyi sirine PGM Kalierang. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 266.K/14/BGL/2009 tentang SOP Tingkat Kegiatan Gunung Api menyebutkan, dalam kondisi darurat, pengamat Gunung Merapi di pos PGM dapat membunyan sirine.

Kendala ini muncul karena sistem otomatis sirine tidak dioptimalkan. Sirine berjumlah 4 buah yang berada di Kalierang Barat, Kalitengah Lor, dusun Tritis, dusun Kinahrejo dan dapat dioperasikan dengan perangkat HT. Pada saat erupsi Merapi tanggal 26 Oktober 2010, sirine yang berada di dusun Kinahrejo terpaksa harus dioperasikan secara manual oleh operator sirine. Padahal, sirine awan panas yang berada di dusun Kinahrejo menjadi sarana penting dalam proses penyelamatan penduduk karena arah luncuran awan panas tepat mengarah ke selatan (Kecamatan Cangkringan).

Hal tersebut menyebabkan "golden time" dalam evakuasi penduduk menjadi berkurang. Berdasarkan fakta tersebut, maka dalam aspek komunikasi dijelaskan bahwa perlu diadakan evaluasi dalam hal prosedur tetap EWS. Sirine merupakan salah satu indikator informasi yang dapat diakses oleh warga dengan mudah. Keberadaan tombol otomatis di Santel juga mengakibatkan koordinasi yang kurang maksimal. BPBD selaku instansi kebencanaan, perlu mengkaji ulang terhadap keberadaan tombol otomatis yang berada di bagian Santel, sehingga arus komunikasi dapat berjalan secara optimal.

Ketiga adalah mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya dalam mengurangi resiko bencana. Sesuai dengan pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka butir 3 menyatakan tentang adanya penyelenggaraan mitigasi bencana dalam bentuk penyuluhan atau pendidikan tentang kebencanaan. Dalam hal mitigasi bencana, kegiatan yang dilakukan dalam tahap pra bencana paska erupsi Merapi 2010 adalah dengan diadakannya program Sekolah Siaga Bencana (SSB).

Program ini merupakan program dari BPBD Propinsi DIY yang menempuh jalur pendidikan sebagai sarana dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kebencanaan. Dengan menggandeng para komunitas peduli bencana dan *Noni Government Organizations* (NGO), program ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi tentang kebencanaan bagi para siswa dan para guru sehingga pengalaman yang diperoleh dapat diaplikasikan ketika terjadi bencana. Namun yang menjadi persoalan adalah peran dari BPBD Pemkab Sleman dirasa kurang dalam program ini. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pihak dari BPBD Pemkab Sleman dalam sosialisasi program tersebut. Padahal secara administratif kewilayah, sosialisasi program SSB ini berada di wilayah kabupaten Sleman.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa sikap dari BPBD Pemkab Sleman selaku regulator di tingkat kabupaten kurang maksimal dalam kegiatan penyuluhan Sekolah Siaga Bencana (SSB). Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan sosialisasi secara matang mengenai kebencanaan sejak dini di lingkungan sekolah akan memberikan dampak positif dalam menghadapi jika ada bencana serupa.

Yang kedua adalah, program SIKAD (Sistem Informasi Kebencanaan Desa). Program ini dilaksanakan sekitar 3 bulan dari bulan Januari 2012 hingga bulan Maret 2012 dengan membuat suatu sistem informasi yang terintegrasi di 40 desa, baik berupa perangkat keras (komputer, modem, HT, SMS Gateway) serta pelatihan terhadap perangkat desa. Kenyataan yang terjadi adalah dalam waktu tiga bulan, hanya 9 desa yang bisa terealisasikan dengan adanya program SIKAD. Diharapkan program ini tidak berhenti karena terbatasnya waktu dari pemerintah yang menginginkan suatu program yang berjalan instan dengan capaian yang memuaskan.

Manajemen Komunikasi Bencana BPBD Pemkab Sleman

Manajemen komunikasi bencana merupakan tahapan dari pengelolaan komunikasi bencana yang mempunyai empat tahapan, yakni **perencanaan, pengorganisasian, monitoring, dan terakhir evaluasi** (Susanto: 2011: 96-99). Berikut akan dijelaskan upaya-upaya yang dilakukan BPBD Pemkab Sleman dalam manajemen komunikasi bencana.

Pertama adalah tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini BPBD mempunyai sejumlah konsep dalam rangka mengelola

komunikasi bencana. Salah satunya adalah konsep mengenai "pengungjian bermartabat" yang diwacanakan dalam menghadapi erupsi Merapi. yang dimaksud dengan pengungjian bermartabat adalah dalam setiap satu kepala keluarga akan dikelompokkan dalam satu hunian sehingga terdapat privasi keluarga. Wacana tersebut tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit, mengingat jumlah korban bencana Merapi tahun 2010 mencapai 15.000 jiwa.

Dengan adanya wacana tersebut, biaya merupakan kendala yang hingga saat ini masih dalam proses pematapan. Dari aspek komunikasi, sosialisasi yang dilakukan kepada warga merupakan salah satu bentuk dari aktivitas komunikasi bencana. Kenyataan yang terjadi di lapangan adalah banyak warga yang belum mengetahui tentang wacana tersebut.

Tahap perencanaan selanjutnya, melalui aspek teknologi, BPBD Pemkab Sleman membentuk divisi Pusdatin yang berdiri pada bulan Maret 2012 dengan fokus pengelolaan satelit yang bernama *Sleman Disaster Information Network* (SDIN). Dalam portal SDIN kita dapat melihat agenda-agenda yang telah dijalankan oleh BPBD dalam pengelolaan bencana alam di wilayah Sleman. Akan tetapi jika dicermati lebih lanjut, maka SDIN merupakan portal yang hanya menyajikan suatu informasi dengan pola yang berulang seperti tahun-tahun sebelumnya. Padahal dalam penyajian informasi, inovasi merupakan salah satu faktor penting dalam keefektifan penyampaian pesan.

Tampilan SDIN dalam bentuk website mempunyai beberapa keunggulan juga kelemahan. Keunggulan diantaranya adalah kita bisa mengakses informasi bencana dengan cepat. Akan tetapi, kelemahannya adalah keakuratan informasi itu sendiri, serta masih banyak warga, terutama yang tinggal di daerah kawasan bencana yang belum mengerti tentang cara penggunaan internet. Mereka lebih percaya dan yakin dengan gejala alam serta informasi yang didapat dari tokoh masyarakat desa setempat. Kemajuan teknologi berkomunikasi bencana menggunakan internet dipandang sebagai suatu terobosan, namun bagi warga kawasan bencana yang belum paham akan teknologi internet, hal itu merupakan kenaiifan tersendiri, karena merekalah sebenarnya yang membutuhkan akses informasi tersebut.

Dalam menghadapi kendala tersebut, maka dalam pengelolaan informasi bencana dibutuhkan suatu metode tanpa sentuhan teknologi.

BPBD Pemkab Sleman telah membentuk Tim SAR yang beranggotakan 30 orang sebagai petugas di lapangan. Sebagian besar dari mereka merupakan warga yang bertempat tinggal di kawasan bencana. Hal ini setidaknya dapat membantu akses informasi bencana kepada warga kawasan bencana yang belum mengerti teknologi internet, karena salah satu dari program kerja dari Tim SAR adalah memantau aktivitas gunung Merapi. Pola komunikasi kinerja dari Tim SAR adalah dengan menggunakan alat HT sebagai acuan utama dalam pemantauan aktivitas Merapi yang langsung terkoneksi dengan frekuensi HT yang ada di BPBD Pemkab Sleman. Terkadang komunikasi dari para Tim SAR terhalang oleh beberapa frekuensi liar yang menyebabkan komunikasi menjadi kurang efektif. Ketiadaan petugas Tim SAR di Posko Utama yang terletak di daerah Pakem di saat jam kerja juga menjadi faktor penghalang keefektifan informasi mengenai aktivitas Merapi.

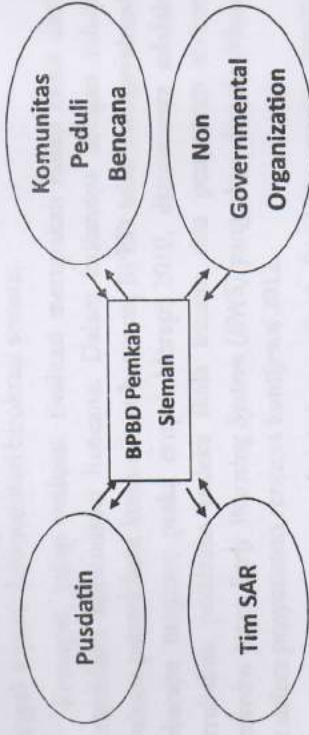
Dalam pengelolaan komunikasi bencana, terdapat beberapa tahapan yang kesemuanya mengacu pada tujuan dalam meminimalisir korban bencana dengan cara berkomunikasi secara tepat dan efektif. Keberadaan SDIN sebagai sarana dalam berkomunikasi masyarakat berbasis teknologi internet mempunyai konsekuensi terhadap penerimaan sebuah informasi. Begitu juga dengan keberadaan Tim SAR sebagai petugas lapangan di saat bencana, masih menimbulkan tanda tanya dalam keberadaan fungsinya, yakni sebagai "pemadam kebakaran" atau sebagai "pencegah kebakaran".

Dalam merangkai informasi mengenai kebencanaan, kedua elemen internal dari BPBD Pemkab Sleman, yakni Pusdatin dan Tim SAR hanya bergerak di wilayah paling luar dalam komunikasi bencana, artinya peran mereka sebagai anggota dalam pengisian konten SDIN dirasakan kurang maksimal dalam pengelolaan komunikasi bencana. SDIN dengan tampilan websitenya mempunyai kelemahan, dikarenakan penduduk di KRB sebagian besar adalah warga yang belum mengerti teknologi internet. Faktor kendala wilayah sebagian Tim SAR yang berasal dari kawasan KRB merupakan salah satu penghambat dalam proses evakuasi.

Kedua, adalah tahap pengorganisasian. Dalam konteks komunikasi internal, selain divisi Pusdatin, BPBD Pemkab Sleman melakukan pengorganisasian komunikasi bencana dengan Tim SAR. Sedangkan dalam konteks komunikasi eksternal, BPBD Pemkab Sleman menjalin kerjasama dengan komunitas peduli bencana serta organisasi

masyarakat atau NGO. Kinerja dari komunitas peduli bencana serta NGO telah dijelaskan di atas, sedangkan konsep pengorganisasian komunikasi bencana dapat digambarkan sebagai berikut:

PENGORGANISASIAN .KOMUNIKASI BENCANA



Gambar 1. Konsep Pengorganisasian Komunikasi Bencana
(Sumber: Hasil dokumentasi & wawancara dengan koordinator Pusdatin BPBD Sleman.)

Poin pengorganisasian dalam konteks pengelolaan komunikasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Pemkab Sleman masih menemui banyak hambatan. Diantaranya adalah divisi Pusdatin yang baru terbentuk pada bulan Maret tahun 2012 jelas menggambarkan bahwa paska terbentuknya SDIN pada tahun 2009 hingga divisi ini terbentuk pada tahun 2012, pusat kelola informasi pada internal BPBD Pemkab Sleman mengalami kerancuan dalam hal wewenang birokrasi. Hal ini mengakibatkan adanya *updating* informasi mengenai bencana terlihat kurang maksimal. Tampilan yang ada di website SDIN sebagai satelit dari Pusdatin hanya mengulang-ulang dari beberapa file yang sudah dipublikasikan. Hal ini tentu dapat dijadikan evaluasi bagi Pusdatin sehingga tercapai kinerja yang optimal.

Dalam hal pengorganisasian, dibutuhkan peran para *stakeholder* BPBD Pemkab Sleman baik itu dari kalangan komunitas peduli bencana maupun dari *Non Government Organization* (NGO) yang bergerak dalam bidang kebencanaan sebagai upaya kesatuan dalam hal kesiapsiagaan bencana terutama dalam bidang pengelolaan komunikasi bencana sehingga terwujud kesatuan dari keseluruhan masyarakat.

Ketiga, adalah tahap monitoring. Tahap ini berfungsi sebagai evaluasi sementara dalam proses pencapaian tujuan. Dalam konteks

pengelolaan komunikasi bencana, BPBD Pemkab Sleman melakukan monitoring terhadap program kerjanya. Monitoring yang dilakukan adalah mengevaluasi sementara terhadap adanya kendala tentang fakta yang tidak sesuai dengan rencana.

Dalam hal monitoring, Pusdatin BPBD Pemkab Sleman mengadakan kerjasama dengan instansi terkait lainnya, misalnya dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Badan Kesbanglinmas). Kerjasama itu misalnya tentang pengkoordinasian jumlah NGO atau jumlah komunitas peduli bencana yang ada di kabupaten Sleman. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mengetahui sejauh mana komunitas atau NGO yang masih aktif dan digunakan untuk koordinasi dalam monitoring untuk keperluan penyusunan dan simulasi rencana kontijensi.

Akan tetapi, kendala yang terjadi adalah, laporan pembaharuan yang diterima oleh Badan Kesbanglinmas tidak ter *update* dengan baik. Ketika peneliti bertemu dengan salah satu staff di Badan Kesbanglinmas, data mengenai jumlah NGO atau komunitas peduli bencana yang aktif di kabupaten Sleman terakhir di *update* sekitar awal tahun 2011. Hal ini tentunya berdampak pada kelangsungan koordinasi yang terjadi antara BPBD dengan para *stakeholder*nya. Alhasil, dalam penyusunan rencana kontijensi tahun 2012, BPBD melibatkan para NGO maupun komunitas peduli bencana yang aktif berdasarkan sumber dari Tim SAR BPBD, yang notabene mengetahui kondisi riil di lapangan.

Selanjutnya, monitoring oleh BPBD Pemkab Sleman juga pernah dilakukan. Yakni mengenai program kerja Pusdatin pada tanggal 15 Juni mengenai konten tentang Pusdatin. Monitoring ini dilakukan oleh divisi Pusdatin serta Bidang Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana dan juga Bidang Perencanaan dan Evaluasi. Tahapan pengendalian atau monitoring kurang terlihat di BPBD Pemkab Sleman dikarenakan perencanaan masih dalam proses yang sedang berjalan.

Berdasarkan kajian teoritik mengenai pengelolaan komunikasi bencana, jelas terlihat bahwa BPBD Pemkab Sleman kurang dalam hal implementasi tahap pengendalian (monitoring). Fungsi dari tahap monitoring adalah untuk mengetahui sejauhmana sumber-sumber yang telah dimanfaatkan serta berbagai hambatan-hambatan yang ada. Dari fakta yang didapat di lapangan, hanya ada satu kali monitoring secara resmi yang dilakukan oleh Pusdatin dalam hal pengelolaan

komunikasi bencana. Kurangnya intensitas pertemuan dari berbagai *stakeholder* dari Pusdatin tentunya akan menimbulkan hambatan-hambatan karena kurangnya koordinasi secara resmi, sehingga salah satu contoh yang telah terjadi adalah output dari Pusdatin yang berupa portal website *Sleman Disaster Information Network* (SDIN) yang tampak seperti dokumentasi birokrasi semata.

Keempat, tahap evaluasi. Evaluasi merupakan tahap akhir dari pengelolaan komunikasi bencana. Dalam kaitannya dengan tahap evaluasi pengelolaan komunikasi bencana, BPBD telah mengevaluasi beberapa program paska erupsi Merapi 2010, diantaranya adalah perubahan perkiraan indeks skala letusan dan penyatuan sistem prosedur tetap *Early Warning System* (EWS) yang akan dimaksukkan ke dalam penyusunan rencana kontijensi 2012.

Berkaitan dengan divisi komunikasi Pusdatin, maka BPBD Pemkab Sleman belum melakukan evaluasi, dikarenakan proses yang masih berjalan. Hal ini disampaikan oleh koordinator Pusdatin, bahwa akan dilakukan tahap evaluasi jika tarafnya sudah kritis. Misalnya diperlukan penambahan personal dari divisi Pusdatin, dikarenakan tingginya kinerja Pusdatin.

Implementasi secara periodik dalam evaluasi perlu dilakukan guna peningkatan dan kelancaran suatu program. Dari fakta yang ada di lapangan, divisi Pusdatin melihat tahap evaluasi akan dilakukan jika keadaan sudah "kritis". Berdasarkan kajian teoritik, maka paska erupsi Merapi tahun 2010 hingga tahun 2012 ini, belum pernah diadakan evaluasi mengenai program yang berhubungan dengan pengelolaan komunikasi bencana.

Belajar dari erupsi Merapi 2010, maka divisi Pusdatin selaku divisi komunikasi di BPBD Pemkab Sleman perlu memberikan kontribusi dalam hal penyusunan rencana kontijensi 2012 yang sedang disusun. Penetapan mengenai prosedur tetap sistem peringatan dini (EWS) merupakan salah satu aspek komunikasi bencana yang belum terkelola dengan baik dalam rencana kontijensi sebelumnya.

Berdasarkan kajian teoritik, maka secara garis besar, evaluasi mengenai perlu diadakan. Hal ini merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengurangan resiko bencana yang didasarkan pada rencana kontijensi yang telah disepakati dalam penanganan bencana.

Dengan wacana skenario dengan pola letusan terbesar, tentunya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam simulasi rencana kontijensi. Diperlukan sinergisitas dari keseluruhan instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam hal pengelolaan komunikasi bencana, guna meminimalisir jumlah korban bencana.

Penutup

Sebagai instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang kebencanaan, BPBD Pemkab Sleman melihat aspek komunikasi sebagai aspek yang vital dalam pengelolaan bencana secara keseluruhan. Pengelolaan komunikasi bencana yang telah dilakukan oleh BPBD Pemkab Sleman pada tahap pra bencana paska erupsi Merapi 2010 dilakukan melalui manajemen komunikasi bencana yang mencakup empat tahapan yakni, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi.

Beberapa hal yang sudah dilakukan dengan baik oleh BPBD Pemkab Sleman diantaranya adalah, pembentukan divisi komunikasi yang bernama Pusdatin dalam mengelola informasi bencana paska erupsi Merapi 2010. Berikutnya adalah, terbentuknya program SIKAD (Sistem Informasi Kebencanaan Desa) serta program Sekolah Siaga Bencana (SSB) yang ditujukan untuk para murid yang tinggal di kawasan rawan bencana dalam menghadapi bencana serupa. Dengan adanya serangkaian program dalam pengelolaan komunikasi bencana oleh BPBD Pemkab Sleman, tidak dipungkiri masih terdapat beberapa kekurangan di dalamnya.

Dari keseluruhan pengelolaan komunikasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Pemkab Sleman, maka akan diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Pengelolaan komunikasi bencana pada cakupan kesiapsiagaan mengenai penyusunan rencana kontijensi terasa masih kurang rapi dalam pengkoordinasiannya. Terbukti dengan data jumlah NGO dan komunitas peduli bencana yang kurang terupdate dengan baik.
2. Perbaikan sistem peringatan dini bencana telah dilakukan oleh BPBD Pemkab Sleman, diantaranya adalah dengan adanya program Sistem Informasi Kebencanaan Desa (SIKAD). Faktanya, target yang semula 40 desa baru tercapai 9 desa, atau sekitar 25 persen.

Hal ini dikarenakan minimnya target waktu dari pemerintah pusat. Sedangkan fakta yang terjadi di lapangan adalah birokrasi yang berbelit dari pemerintah pusat hingga akhirnya sampai pemerintah daerah. Mengenai birokrasi yang berbelit, terbukti dengan adanya program Sekolah Siaga Bencana (SSB) yang merupakan program dari BPBD Propinsi kurang terdengar gaungnya di BPBD Pemkab Sleman, padahal program tersebut berada dalam naungan kabupaten Sleman.

3. Pemanfaatan situs Sleman Disaster Information Network (SDIN) oleh BPBD Pemkab Sleman terbukti kurang efektif dalam penyebaran informasi bencana. Dalam hal ini, masyarakat lebih mengandalkan informasi dari frekuensi beberapa radio komunitas yang tersebar di desa-desa.
4. Sinergisitas dalam hal pengorganisasian komunikasi bencana masih terlihat kurang maksimal. Terbukti dengan kurangnya intensitas pertemuan antara stakeholder BPBD dalam penyusunan konten website SDIN.

Daftar Pustaka

- Haryanto, Ignatius. (2010). *Media di Bawah Dominasi Modal: Ancaman Terhadap Hak Atas Informasi*, dalam ELSAM. 2010. Majalah bulanan Asasi edisi bulan April 2010
- Littlejohn, Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss. (2006). *Teori Komunikasi (Theories of Human Communications)*, terjemahan Muhammad Yusuf Hamdan. Jakarta. Salemba Humanika
- Nugroho, Asep dan Ekka Sarwo. (2011). *Dramatisasi Jurnalisme Media Lokal*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Susanto, Eko Harry. (2011). *Komunikasi Bencana*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo
- Zamzami, Diqi, Sandy Argananta, dan Faris Afandi. (2011). *Kemelut Berita dalam Kemelut Bencana*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Sumber Internet

- <http://www.yeu.or.id/images/file/UUNo.24Tahun2007.pdf>, diakses 2 Februari 2012 pukul 12:39
- <http://pendakijogja.wordpress.com/2010/12/15/2010-merapi-giant-eruption-vei-4-part-ii/>, diakses 7 Juli 2012, pukul 13:45